

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sektor pertanian mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah dengan pertumbuhan ekonomi positif (Sudarwati & Nabila, 2024). Subsektor tanaman pangan berkontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap kebutuhan masyarakat. Tanaman pangan di Indonesia memiliki berbagai macam jenis, salah satunya adalah padi. Komoditas padi berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, yaitu kondisi ketika masyarakat memiliki hak dan akses terhadap pangan yang cukup, bergizi dan juga aman guna memenuhi kebutuhan hidup (Tranggono *et al.*, 2023).

Beras merupakan salah satu komoditas utama yang dihasilkan oleh sektor pertanian di Indonesia (Ariani *et al.*, 2024). Beras juga merupakan makanan pokok bagi sebagian besar populasi di berbagai negara kawasan Asia, khususnya Indonesia. Barang komoditi seperti beras adalah kebutuhan primer hampir setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat (Arinal dan Azhari, 2023). Kebutuhan beras akan meningkat dari waktu ke waktu karena populasi masyarakat terus bertambah. Kekurangan pasokan beras bisa menyebabkan kelangkaan bahan pangan, yang dapat berdampak pada kegiatan masyarakat (Adinata *et al.*, 2024). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong pencapaian swasembada pangan khususnya komoditas beras sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan impor (Kementerian Pertanian, 2025).

Tahun 2023-2024 volume impor beras Indonesia tercatat sangat tinggi, bahkan mencapai sekitar empat juta ton. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara capaian produksi domestik dan dinamika kebutuhan serta stabilitasi pasokan dalam negeri. Berdasarkan laporan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) pada tahun 2026, produksi beras 2025 tembus sebesar 34, 71 juta ton, meningkat 13,36% dibandingkan tahun 2024. Secara statistik Indonesia seringkali mencatat surplus produksi padi. Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya mampu menekan ketergantungan impor beras.

Berikut adalah tren konsumsi beras domestik serta jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan konsumsi beras rumah tangga dan proyeksi jumlah penduduk di Indonesia, 2020-2025

Tahun	Jumlah penduduk	Konsumsi dalam rumah tangga	Pertumbuhan konsumsi
	(000 Jiwa)	(Kg/kapita/tahun)	(%)
2020	270.203,9	94,2760	-
2021	272.682,5	94,3815	0,11
2022	275.773,8	93,5088	-0,92
2023	278.696,2	93,7913	0,30
2024	281.603,8	92,3983	-1,49
2025	284.438,8	92,3679	-1,52
Rata-rata	277,233,2	93,4540	-0,704

Sumber: Susenas Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 1 menunjukkan rata-rata konsumsi beras rumah tangga di Indonesia selama periode 2020-2025 sebesar 93,45 kg/kapita/tahun, dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi sebesar -0,704% per tahun, yang menunjukkan kecenderungan penurunan konsumsi beras. Rata-rata jumlah penduduk Indonesia selama periode 2020-2025 mencapai sekitar 277, 23 juta jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,03% per tahun. Meskipun konsumsi beras per kapita mengalami tren penurunan, peningkatan jumlah penduduk setiap tahun menyebabkan kebutuhan beras nasional secara agregat tetap tinggi. Kondisi ini menunjukkan apabila peningkatan produksi domestik tidak sepenuhnya mampu mengimbangi total kebutuhan yang terus bertambah, maka impor beras menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

Berdasarkan kondisi tersebut, impor beras dilakukan pemerintah guna memenuhi kebutuhan domestik dan menjaga stok beras di Perum Bulog. Langkah impor beras memiliki beberapa keuntungan dalam mengembalikan stabilitas ekonomi negara. Namun, jika tidak menggunakan kebijakan yang tepat dalam menangani kuota beras impor dan beras lokal, maka hasil pertanian lokal akan semakin tergeser oleh produk impor dan ketahanan pangan negara akan semakin bergantung pada produk impor. Impor beras Indonesia selama lima tahun periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Impor beras Indonesia menurut negara asal, 2020-2024

Negara Asal	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berat bersih (ton)					
India	10.594,4	215.386,5	178.533,6	69.715,7	246.587,9
Thailand	88.593,1	69.360,0	80.182,5	1.381.921,2	1.364.233
Vietnam	88.716,4	65.692,9	81.828,0	1.147.705,3	1.248.245
Pakistan	110.516,5	52.479,0	84.407,0	309.309,7	803.844,7
Myanmar	57.841,4	3.790,0	3.830,0	141.204,0	831.379,0
Jepang	0,3	230,0	56,1	61,5	100,7
Tiongkok/Cina	23,8	42,6	6,0	7,0	19,3
Taiwan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lainnya	0,3	760,1	364,1	12.933,3	25.011,2
Jumlah/Total	356.286,2	407.741,4	429.207,3	3.062.857,6	4.519.421

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2 menunjukkan Indonesia memperoleh pasokan beras dari negara pemasok utama yaitu Thailand, Vietnam, India, Pakistan dan Myanmar. Fenomena impor beras yang terjadi berulang setiap tahun mengindikasikan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada volume produksi padi dalam negeri. Artinya, terjadi ketidakseimbangan antara kapasitas produksi, distribusi serta konsumsi beras nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Risnanda *et al.* (2025), selama lima tahun terakhir seluruh impor beras medium dikoordinasikan oleh Perum Bulog dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi strategis terkait ketersediaan pangan dan stabilitas harga (KPSH). Pengelolaan stok beras oleh Bulog difokuskan untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang harus menyediakan 300 ribu ton setiap bulan.

Pada Pasal 3 ayat (2) Permendag memberikan mandat kepada Perum BULOG untuk menjalankan fungsi stabilitasi harga beras baik di tingkat produsen maupun konsumen, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), pelaksanaan kegiatan pengadaan, distribusi dan impor komoditas beras (Octania, 2021). Kondisi tersebut berimplikasi pada keberlanjutan sistem produksi pangan, tidak hanya berdampak pada makroekonomi tetapi impor beras paling memengaruhi petani kecil yang menjadi aktor utama dalam menjaga kestabilan pasokan domestik.

Kurnia *et al.* (2020) menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional adalah berkurangnya lahan pertanian, tidak sebanding dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi akibat pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu faktor lain seperti belum optimalnya produktivitas pertanian dalam negeri

yang rentan terhadap fluktuasi iklim, kenaikan suhu dan curah hujan yang tidak menentu sehingga berdampak negatif secara signifikan terhadap produksi beras di Indonesia (Massagony *et al.*, 2022).

Pemerintah menerapkan kebijakan Swasembada Pangan Nasional sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian pangan, tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kebijakan ini menekankan peningkatan produksi pangan strategis, perbaikan infrastruktur pertanian, efisiensi rantai pasok, dan pengendalian impor untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Salah satu fokus utamanya adalah mewujudkan swasembada beras yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025, Indonesia resmi mencatatkan pencapaian swasembada beras setelah produksi beras nasional melampaui kebutuhan konsumsi domestik. Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional, surplus produksi beras nasional tahun 2024-2025 mencapai lebih dari satu juta ton (Bapanas, 2025). Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pangan Indonesia, sekaligus bukti nyata dari implementasi kebijakan swasembada pangan nasional.

Produksi dan konsumsi beras merupakan faktor fundamental dalam menentukan kebutuhan impor beras. Peningkatan produksi beras domestik berpotensi menekan impor, sementara tingginya tingkat konsumsi beras dapat meningkatkan kebutuhan pasokan apabila produksi dalam negeri tidak tercukupi. Hampir 97% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok, (Wibawa *et al.*, 2023). Tingkat produksi beras dan tingkat konsumsi beras yang tidak stabil menyebabkan Indonesia harus mengimpor beras.

Selain faktor sektoral tersebut, kondisi makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan inflasi juga berperan dalam memengaruhi impor beras. Pertumbuhan PDB mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat yang dapat memengaruhi permintaan pangan, termasuk beras. Secara teori, peningkatan PDB dapat berdampak pada perubahan pola konsumsi dan kebutuhan pangan. Jika pertumbuhan ekonomi diikuti oleh peningkatan produksi

domestik, khususnya di sektor pertanian maka ketergantungan terhadap impor menurun (Armaini dan Eddy, 2016).

Selain PDB, inflasi mempengaruhi stabilitas harga dan kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga rata-rata, dimana harga menunjukkan pertukaran uang dengan barang atau jasa. Menurut Keynes, hubungan antara inflasi dan impor beras dapat dijelaskan melalui konsep *demand-pull inflation*, yaitu peningkatan permintaan total yang berlebihan (Sukirno, 2016). Inflasi menyebabkan kenaikan harga barang produksi dalam negeri membuat barang impor menjadi lebih murah secara relatif, sehingga meningkatkan jumlah impor (Sukirno, 2016).

Harga beras internasional juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi perbandingan antara harga domestik dan harga impor, sehingga pertimbangan penting dalam penetapan kebijakan impor beras. Harga beras berperan penting dalam menentukan jumlah impor beras di Indonesia. Perubahan harga beras, baik di pasar internasional maupun domestik, dapat mempengaruhi kebijakan impor beras di Indonesia (Yasinta *et al.*, 2025). Kenaikan harga beras di pasar dalam negeri umumnya mendorong pemerintah mendorong pemerintah maupun pelaku usaha meningkatkan impor guna menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan (Aryani, 2021). Kombinasi antara produksi, konsumsi, PDB, harga beras domestik, Inflasi, dan harga harga beras internasional tersebut pada akhirnya memengaruhi volume impor beras di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk menganalisis pengaruh Produksi Beras, Konsumsi Beras, Produk Domestik Bruto (PDB), Harga beras domestik, Inflasi dan Harga Beras Internasional terhadap Impor Beras Indonesia dengan menggunakan periode tahun 2015-2025 serta menganalisis kondisi Ketahanan Pangan Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan impor beras yang adaptif dan berorientasi pada penguatan ketahanan pangan nasional dan swasembada beras berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh produksi beras, konsumsi beras, Produk Domestik Bruto (PDB), harga beras domestik, inflasi, dan harga beras internasional terhadap impor beras Indonesia periode 2015-2025.
2. Bagaimana kondisi ketahanan pangan Indonesia ditinjau dari aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh produksi beras, konsumsi beras, Produk Domestik Bruto (PDB), harga beras domestik, inflasi, dan harga beras internasional terhadap impor beras Indonesia periode 2015-2025.
2. Menganalisis kondisi ketahanan pangan di Indonesia berdasarkan subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pangan nasional, khususnya dalam pengendalian impor beras, stabilitas harga, dan penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi makroekonomi.
2. Bagi lembaga pangan dan pelaku agribisnis, penelitian ini dapat memberikan informasi strategis bagi lembaga pangan seperti Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG serta pelaku agribisnis dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan stok, distribusi dan peningkatan daya saing beras domestik di tengah fluktuasi ekonomi makro dan pasar global.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan empiris dan dasar pengembangan model analisis lanjutan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi impor pangan strategis, khususnya beras dengan periode dan pendekatan yang lebih komprehensif.